

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI
INDONESIA TAHUN 2018-2022**



Oleh:

Nama : Muhammad Naufal Majid
Nomor Mahasiswa : 19313301
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**

**Analisis Regresi Data Panel Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan
Di Indonesia Tahun 2018-2022**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Srata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Muhammad Naufal Majid
Nomor Mahasiswa : 19313301
Program Studi : Ekonomi Pemabangunan

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Majid
NIM : 19313301
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Fakultas Bisnis dan Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“ FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2022 ”

adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Adapun pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya rujuk dan saya tuliskan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri atau mengandung unsur plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Januari 2026

Penulis



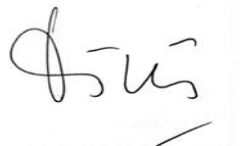
(Muhammad Naufal Majid)

PENGESAHAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2022

Nama : Muhammad Naufal Majid
Nomor Mahasiswa : 19313301
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta,
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Diana Wijayanti, S.E.,M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2022

Disusun oleh : MUHAMMAD NAUFAL MAJID

Nomor Mahasiswa 19313301

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 10 Maret 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dra. Diana Wijayanti, M.Si.

Penguji : Dr. Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatub

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kelancaran yang Engkau berikan, penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan berbagai pihak untuk itu Skripsi ini akan penulis dedikasikan kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan ridho dan nikmatNya, hingga penulis selalu diberikan pertolongan dan kemudahan selama pengerjaan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dari awal menjadi mahasiswa baru hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Adik dan kakak penulis yang senantiasa memberikan support kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatub

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018-2022”. Penyusunan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Selama proses pengerjaan penelitian ini tentu tidak mudah dan perlu adanya bantuan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dengan begitu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
JUDUL.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Kemiskinan.....	16
2.1.2 Tingkat Pengangguran.....	19
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	20
2.1.4 Upah Minimum Provinsi (UMP).....	21
2.1.5 Tingkat Pendidikan.....	22
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	23
2.2.1 Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan.....	23
2.2.2 Hubungan PDRB Terhadap Kemiskinan.....	23
2.2.3 Hubungan UMP Terhadap Kemiskinan.....	24
2.2.4 Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan.....	24
2.3 Kerangka Penelitian.....	25
2.4 Hipotesis Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Dan Cara Pengumpulan Data.....	26

3.2	Definisi Variabel Operasional.....	26
3.2.1	Variabel Penelitian.....	26
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	28
3.4	Metode Analisis.....	29
3.5	Persamaan Model Penelitian.....	29
3.5.1	Common Effect Models (CEM).....	29
3.5.2	Fixed Effect Models (FEM).....	30
3.6	Uji Pemilihan Model.....	30
3.6.1	Uji Chow (Chow Test).....	30
3.6.2	Uji Hausman.....	30
3.7	Uji Statistik.....	31
3.7.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	31
3.7.2	Koefisien Regresi Secara Parsial (uji t).....	31
3.7.3	Uji Regresi Secara Simultan (uji F).....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		33
4.1	Deskriptif Data Penelitian.....	33
4.2	Hasil Analisis Dan Pembahasan.....	33
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	33
4.2.2	Pengujian Common Effect Model (CEM).....	34
4.2.3	Pengujian Fixed Effect Model (FEM).....	35
4.2.4	Pengujian Random Effect Model (REM).....	36
4.2.5	Uji Chow.....	37
4.2.6	Uji Hausman.....	37
4.2.7	Model Regresi Terbaik.....	38
4.3	Pemilihan Model Yang Tepat.....	39
4.3.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	39
4.3.2	Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t).....	40
4.3.3	Koefisien Regresi Secara Simultan (uji F).....	41
4.3.4	Analisis Ekonomi.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		45
5.1	Kesimpulan.....	45
5.2	Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....		48
LAMPIRAN.....		50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018-2022.....	11
Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif.....	34
Tabel 4. 2 Hasil Model Common Effect.....	35
Tabel 4. 3 Hasil Model Fixed Effect.....	35
Tabel 4. 3 Hasil Model Fixed Effect (Lanjutan).....	36
Tabel 4. 4 Hasil Teknik Random Effect.....	36
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow.....	37
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman.....	38
Tabel 4. 7 Hasil Regresi Terbaik.....	38
Tabel 4. 7 Hasil Regresi Terbaik (lanjutan).....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM)	50
Lampiran 2. Hasil Uji Common Effect Model (CEM)	50
Lampiran 3. Hasil Uji Random Effect Model (REM)	51
Lampiran 4. Hasil Uji Chow	52
Lampiran 5. Uji Hausman	52
Lampiran 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif	53
Lampiran 7. Data Penelitian	50

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018 hingga 2022. Adapun variabel dependen yaitu Kemiskinan, sedangkan variabel independen yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Provinsi (UMP), Tingkat Pendidikan (TP). Pendekatan regresi data panel dan pengujian hipotesis dengan uji parsial, gabungan, dan koefisien determinasi merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: TPT dan UMP mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia. PDRB tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Indonesia. TP tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: Kemiskinan, PDRB, TP, UMP, TPT.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence Poverty in Indonesia in 2018 to 2022. The dependent variable is Poverty, while the independent variables are the Open Unemployment Rate (TPT), Gross Regional Domestic Product (PDRB), Provincial Minimum Wage (UMP), Education Level (TP). The panel data regression approach and hypothesis testing with partial, combined, and coefficient of determination tests are the methodologies used in this study. The results of the study indicate that: TPT and UMP have a positive relationship and have a significant effect on Poverty in Indonesia. PDRB has no effect on Poverty in Indonesia. TP has no effect on Poverty in Indonesia.

Keywords: Poverty, PDRB, TP, UMP, TPT.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan maksud menciptakan peluang kerja dan menciptakan tingkat perekonomian yang baik bagi masyarakat Indonesia, yang berdampak pada kesejahteraan penduduk Indonesia. Target Pembangunan nasional antara lain adalah mengurangi jumlah kemiskinan penduduk.. Permasalahan tingkat kemiskinan adalah isu yang rumit dan memiliki dimensi yang beragam. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengatasi kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu. Tingkat kemiskinan adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan umum di Indonesia. Lebih lanjut, terdapat korelasi yang berlawanan antara tingkat kesejahteraan umum dan Salah satu permasalahan ekonomi yang perlu dikurangi dan diatasi adalah masalah kemiskinan tingkat kemiskinan di Indonesia, yang berarti bahwa semakin tinggi kesejahteraan di negara ini, semakin rendah tingkat kemiskinan penduduknya.

Garis kemiskinan di berbagai negara bervariasi dan dapat berubah tergantung pada tingkat pendapatan serta tahap perkembangan ekonomi dan sosial negara tersebut. Garis kemiskinan mengacu pada tingkat konsumsi minimum, pengeluaran, atau pendapatan yang diperlukan agar seseorang dapat menjalani kehidupan yang layak. Pemerintah melaksanakan beragam inisiatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum melalui pembangunan nasional. Salah satu dari upaya tersebut adalah mengalokasikan sumber daya pembangunan ke berbagai wilayah, terutama tingkat kesejahteraan yang rendah di suatu daerah. Sistem pembangunan ini dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, dilihat dari kebutuhan dan prioritas di setiap daerah, dan program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang tingkat nasional sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Penurunan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam

pembangunan. Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan pada daerah-daerah di Indonesia maka tingkat kemiskinan akan semakin menurun.

Kemiskinan merupakan kondisi dimana individu maupun masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang saling terkait. Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya berhasil mengatasi atau menyelesaikan masalah ini, tetapi mereka telah berhasil mengurangi jumlah orang miskin dan mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang berada dalam kondisi tersebut. Hal yang sama berlaku untuk situasi yang terjadi di kalangan masyarakat. Dari perspektif agama, hal ini dapat dijelaskan dengan jelas. Dalam agama Islam, terdapat perbedaan yang jelas pada individu yang disebut sebagai miskin dan mereka yang termasuk dalam golongan fakir. Masyarakat miskin adalah penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan mereka, sementara penduduk fakir merupakan orang yang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi potensi tersebut belum terealisasi sepenuhnya. Menurut PPP *World Bank* 2017 yang telah diadopsi sejak 2022, pada basis perhitungan baru, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem menjadi US\$ 2,15 per orang per hari atau Rp 32.745 per hari (kurs Rp 15.230 per US\$). Sebelumnya, garis kemiskinan ekstrem ada di angka US\$ 1,90.

Tabel 1. 1 Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2018	25,95	9,82
2019	24,79	9,22
2020	27,55	10,19
2021	26,5	9,71
2022	26,36	9,57

Sumber: BPS 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah penduduk dan presentase penduduk miskin Indonesia mampu mengurangi penduduk miskin dari 25,95 juta jiwa atau 9,82 persen pada tahun 2018 menjadi 24,79 juta jiwa atau 9,22 persen di tahun 2019.

Meskipun terbilang rendah dibanding tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2020 kemiskinan meningkat menjadi 27,55 juta jiwa atau 10,19 persen meningkat cukup tinggi dibanding tahun 2019 dan menurun kembali ditahun 2021 dan 2022. Peningkatan jumlah penduduk miskin pada september 2020 diakibatkan oleh pandemi Covid-19, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan bertambah 2,76 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa.

Tingkat pengangguran didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah individu yang tidak bekerja dengan total jumlah pekerja, dan pengangguran itu sendiri mencakup orang-orang yang sedang aktif mencari pekerjaan, yang tengah bersiap untuk memasuki dunia bisnis, atau mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan baru. Selain itu, pengangguran juga mencakup individu yang sudah bekerja namun belum memulai aktivitas pekerjaan (Badan Pusat Statistik 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Paramita & Purbadharmaja, 2015) dengan judul "Pengaruh Investasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Bali," hasil studi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki dampak tidak langsung yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui faktor pertumbuhan ekonomi. Isu pengangguran masih menjadi fokus utama bagi negara-negara berkembang. Banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia telah menjadi permasalahan sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru, dan sejak memasuki era reformasi, negara ini terus mengalami ketidakstabilan dalam berbagai isu ekonomi. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah salah satu target utama dalam upaya pembangunan nasional. Sebagai sebuah negara yang sedang mengalami perkembangan, Indonesia patut mengerjakan berbagai transformasi yang mensupport pembangunan nasional. Ini dilakukan dengan tujuan menciptakan kemapanan nasional, menciptakan situasi penanaman modal yang kondusif, serta mencapai perkembangan ekonomi yang besar, alhasil sanggup mengurangi tingkat jumlah orang yang menganggur di Indonesia.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ketika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah meningkat, perkembangan daerah tersebut cenderung menjadi lebih baik, dengan efek tidak langsung yang dapat

mengurangi tingkat kemiskinan. Fenomena ini muncul karena tingginya PDRB daerah memungkinkan peningkatan investasi dalam sarana dan prasarana, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, PDRB yang tinggi juga berpotensi membantu mengatasi pengangguran dengan menciptakan peluang kerja melalui optimalisasi sumber daya daerah, termasuk sumber daya alam dan modal. PDRB sangat penting karena PDRB merupakan ekspansi dari kapasitas untuk memproduksi barang dan jasa dari suatu perekonomian, PDRB juga dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi daerah, maka PDRB sangat penting dalam penurunan tingkat kemiskinan.

Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan konsisten, tingkat rata-rata upah minimum di 34 provinsi terus mengalami peningkatan, bertujuan untuk meningkatkan penghasilan bagi pekerja yang menerima gaji rendah. Namun, di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, dampak dari kebijakan upah minimum masih menjadi sumber perdebatan. Pertanyaan mendasar adalah apakah kebijakan ini dapat mengatasi permasalahan upah rendah dan mengurangi kemiskinan, atau sebaliknya, apakah penerapan upah minimum justru akan mengakibatkan penurunan peluang kerja baik di sektor formal maupun informal, serta terjadinya pemutusan hubungan kerja massif. Selain itu, perlu dipertimbangkan apakah kebijakan ini memiliki pengaruh terhadap rata-rata upah di pasar tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi besar, memiliki potensi sumber daya manusia yang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, jumlah penduduk yang besar justru menjadi beban pembangunan. Penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan tingkat pengangguran. Kenaikan UMP yang signifikan seringkali memicu tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan angka pengangguran yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan di Indonesia.

Variabel independen yang terakhir yaitu Tingkat Pendidikan, pendidikan formal dan non formal memiliki peran krusial dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Peran ini dapat bersifat tidak

langsung melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi secara umum, serta secara langsung melalui pelatihan yang diberikan kepada golongan miskin untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan guna meningkatkan produktivitas mereka. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka (Lincoln & Adiningsih, 1997) . Faktanya di Indonesia khususnya pada bidang pendidikan tingkat pendidikan masih sangat rendah, pada daerah-daerah tertentu akses pendidikan masih sangat buruk. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, kita dapat memutus lingkaran kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Kemiskinan di Indonesia bervariasi dalam hal jumlah dan persentase antara berbagai wilayahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti jumlah penduduk, karakteristik demografis, dan kebijakan lokal yang diterapkan. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang juga memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di berbagai daerah, seperti tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, upah minimum, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan latar belakang dan data penelitian sebelumnya menunjukkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018-2022 Menggunakan Regresi Data Panel (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia)”**.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018-2022?
- b. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018-2022?
- c. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2108-2022?
- d. Bagaimana pengaruh tingkat Pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

- a. Menganalisis apakah variabel TPT, PDRB, Upah Minimum Propinsi, dan Tingkat Pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan di Indonesia.
- b. Menganalisis apakah variabel TPT, PDRB, Upah Minimum Propinsi, dan Tingkat Pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di Indonesia.
- c. Menganalisis estimasi parameter regresi data panel terbaik.

Manfaat Penelitian :

- a. Menjadi salah satu bahan pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan dan penelitian.
- b. Harapannya penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pelengkap dibidang ilmu ekonomi Pembangunan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengambil tema kemiskinan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu kompleks yang masih sulit diatasi di berbagai wilayah di Indonesia. Upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan masih terus diperbaiki secara berkelanjutan hingga saat ini. Menurut laporan World Bank (2004) yang dikutip oleh (Saputra, 2011) , salah satu penyebab utama kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, perumahan, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Faktor lain yang terkait dengan kemiskinan melibatkan keterbatasan peluang pekerjaan, di mana banyak yang tergolong miskin mengalami pengangguran, sementara tingkat pendidikan dan kesehatan mereka cenderung kurang memadai. Penanganan masalah kemiskinan tidak bisa terpisah dari isu-isu seperti pengangguran, pendidikan, dan kesehatan, yang secara eksplisit terkait erat dengan permasalahan kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatan untuk mengatasi kemiskinan harus bersifat lintas sektor, melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah keadaan yang kurang sejahtera yang diukur dalam bentuk nilai Rupiah per individu per bulan. Di sisi lain, Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) digunakan sebagai standar untuk mendefinisikan kemiskinan, dan ini mengacu pada kondisi yang kurang memadai akibat kebutuhan dasar seorang pekerja selama satu bulan, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. KFM dihitung berdasarkan jumlah kalori, protein, vitamin, dan mineral lain yang diperlukan untuk memastikan seseorang dapat menjalani kehidupan yang layak. Selain itu, kebutuhan konsumsi juga mencakup aspek lain seperti perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Standar yang digunakan adalah 2100 kalori per hari untuk kelompok makanan, ditambah dengan kebutuhan minimal lain yang bukan

termasuk dalam kategori makanan, sesuai dengan penjelasan oleh (Soesastro, 2005).

Menurut (Munkner & Walter, 2001) , kemiskinan dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang beragam, dan ini tergantung pada kelompok apakah yang mengalami kemiskinan berada di pedesaan atau pada perkotaan serta struktur keluarga mereka, apakah keluarga inti, keluarga kecil, atau individu yang hidup sendiri. Terdapat beberapa sudut pandang mengenai penyebab kemiskinan antara lain:

1. Jika tingkat sumber daya yang rendah dan persyaratan perdagangan yang dianggap tidak menguntungkan sebagai penyebab utama kemiskinan, maka langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kemiskinan adalah meningkatkan produktivitas, memperluas akses pada sektor pasar, dan memastikan harga yang wajar untuk produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat miskin.
2. Jika kondisi lingkungan alam yang buruk menjadi penyebab utama dari penyebaran kemiskinan, maka solusinya adalah menggunakan sumber daya alam secara lebih bijaksana dan menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan.
3. Jika faktor tingkat pengetahuan yang rendah dan keterampilan yang terbatas dianggap sebagai faktor yang signifikan dalam kemiskinan, maka pendekatan yang diperlukan adalah meningkatkan tingkat pendidikan dan pelatihan.

Dengan demikian, penyebab kemiskinan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan karakteristik kelompok miskin yang bersangkutan, sehingga penanganannya harus disesuaikan dengan permasalahan yang spesifik.

Menurut (Edi, 2005) , kemiskinan memiliki berbagai factor penyebab yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Faktor Individu: Ini terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis individu yang mengalami kemiskinan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh kemampuan individu masyarakat dalam menghadapi kehidupan.
2. Faktor Sosial: Dimana kondisi lingkungan sosial yang dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam kemiskinan. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia,

jenis kelamin, atau etnis dapat menyebabkan masyarakat menjadi miskin. Faktor ini juga mencakup kondisi ekonomi dan sosial individu yang miskin, yang seringkali berperan dalam mewariskan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3. Faktor Kultural: Ini terkait dengan kondisi atau kualitas budaya yang dapat menyebabkan kemiskinan. Salah satu contoh adalah konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan, yang mengaitkan budaya kemiskinan dengan kebiasaan hidup. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Oscar Lewis di Amerika Latin, menunjukkan bahwa orang miskin memiliki sub-kultur atau kebiasaan tertentu yang berbeda dengan masyarakat umum. Hal ini mencakup sikap-sikap "negatif" seperti kemalasan, fatalisme, kurangnya semangat berwirausaha, dan kurangnya penghargaan terhadap etos kerja.
4. Faktor Struktural: Ini terkait dengan struktur atau sistem yang dianggap tidak adil, tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin, dan sulit diakses, sehingga dapat menyebabkan individu atau kelompok tertentu menjadi miskin. Sebagai contoh, penerapan sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia dianggap telah membuat petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjebak dalam ketidaksetaraan ekonomi, dengan pajak dan kondisi investasi yang lebih menguntungkan orang kaya dan investor asing, sehingga mengakibatkan akumulasi kekayaan yang tidak merata.

Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB), tingkat pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan. Selain itu adapun faktor-faktor yang lain seperti dampak terjadinya wabah Covid-19 yang menyebabkan pondasi ekonomi melemah yang terjadi pada tahun 2019 dan berlangsung hingga 2023 pemerintah memberikan keputusan tentang berakhirnya Covid-19, sampai saat ini pemerintah masih berupaya untuk memperbaiki perekonomian agar kembali pulih.

2.1.2 Tingkat Pengangguran

Menurut *World Bank* pada tahun 2010, pengangguran adalah ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja secara aktif mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu, namun tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya.

(Mankiw, 2002) , pengangguran adalah isu makroekonomi yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan individu dan merupakan masalah yang sangat serius. Ketika orang kehilangan pekerjaan, hal ini menyebabkan penurunan standar hidup mereka dan dampak psikologis yang berat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pengangguran sering menjadi topik utama dalam perdebatan politik, dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka usulkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.

Terdapat beberapa jenis pengangguran berdasarkan karakteristiknya, yaitu:

1. Pengangguran Terbuka

Ini terjadi ketika pertumbuhan jumlah tenaga kerja lebih cepat daripada lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak dapat menemukan pekerjaan. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang sudah mencapai usia angkatan kerja, tetapi belum memiliki pekerjaan, dan mereka sedang aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau bahkan sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

2. Pengangguran Terselubung

Jenis pengangguran ini terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi (produksi) melebihi jumlah yang seharusnya diperlukan atau melampaui standar yang berlaku. Biasanya, pengangguran tersembunyi terjadi dalam organisasi atau lembaga yang mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja daripada yang sebenarnya diperlukan, sehingga menyebabkan kurang efisiennya proses produksi.

3. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman terjadi pada masa-masa tertentu dalam satu tahun, terutama di sektor pertanian. Seperti para petani tembakau yang hanya mengandalkan dari hasil panen tembakau yang hanya sekali dalam satu tahun.

Selain sektor pertanian, sektor perikanan juga menjadi faktor utama yang termasuk pengangguran musiman

4. Pengangguran Setengah Menganggur

Ini adalah jenis pengangguran di mana seseorang bekerja di bawah jam kerja normal yang berlaku. Di Indonesia, standar jam kerja normal adalah 35 jam per minggu menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Tidak hanya jam kerja saja namun upah yang terlalu rendah dan produktivitas yang sangat rendah juga termasuk dalam pengangguran setengah menganggur.

Menurut (Sadono, 2000) , pengangguran merujuk pada situasi di mana seseorang termasuk dalam angkatan kerja dan ingin memiliki pekerjaan, namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merujuk pada total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi di suatu wilayah atau provinsi. Nilai tambah bruto, pada dasarnya, adalah nilai produksi bersih setelah dikurangkan dengan biaya antara yang digunakan dalam proses produksi. Komponen-komponen dari nilai tambah bruto meliputi pendapatan faktor (seperti gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak langsung netto. Dengan menghitung nilai tambah bruto dari setiap sektor dan kemudian menjumlahkannya, kita dapat mendapatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah.

(Kuncoro, 1997) pendekatan pembangunan tradisional lebih berfokus pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Pertumbuhan ekonomi, pada dasarnya, tercermin dalam pertumbuhan angka PDRB. Saat ini, PDRB umumnya dihitung menggunakan dua pendekatan, yaitu berdasarkan sektor ekonomi/lapangan usaha dan berdasarkan penggunaan. Selain itu, PDRB juga dihitung dengan mempertimbangkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

Badan Pusat Statistik (BPS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga pasar adalah total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh

seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan melalui gabungan bahan baku dan faktor produksi dalam proses produksi. Perhitungan nilai tambah bruto melibatkan pengurangan biaya dari nilai produksi (output). Komponen-komponen dalam nilai tambah bruto ini mencakup pendapatan faktor (seperti upah, bunga, sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Jadi, dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari setiap sektor dan menggabungkannya, kita dapat menghitung Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga pasar.

2.1.4 Upah Minimum Provinsi (UMP)

Secara umum, evaluasi terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu dari perspektif pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Dari sudut pandang pekerja, upah dianggap sebagai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarga. Upah juga berfungsi sebagai dorongan motivasi bagi pekerja dalam meningkatkan produktivitas mereka. Dari perspektif perusahaan, upah dianggap sebagai pengurang terhadap keuntungan yang diperoleh karena merupakan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses produksi. Dari perspektif pemerintah, upah dianggap sebagai alat untuk menciptakan pendapatan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun hingga saat ini di Indonesia upah minimum pada setiap wilayah berbeda-beda yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan pekerja antar daerah (Djojohadikusumo, 1995).

Di sisi lain, beberapa ekonom dan pembuat kebijakan berpendapat bahwa mengurangi atau bahkan menghapus peraturan mengenai Upah Minimum dapat menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel dan meningkatkan daya saing ekonomi. Mereka yang mendukung pandangan ini melihat Upah Minimum sebagai penyebab potensial dari stagnasi upah, yang dapat memperlambat penciptaan lapangan kerja dan akhirnya meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan pada suatu daerah (Gindling & Terrell, 2010).

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP-226/MEN/2000 yang mengubah beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-01/MEN/1999 tentang upah

minimum, upah minimum propinsi adalah besaran upah yang diberlakukan secara seragam di seluruh kabupaten atau kota dalam satu propinsi. Besarnya upah minimum di setiap wilayah propinsi, kabupaten, atau kota berbeda-beda karena bergantung pada tingkat kebutuhan hidup minimum (KHM) yang ada di masing-masing daerah tersebut.

2.1.5 Tingkat Pendidikan

(Subroto, 2014) Pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan ekonomi. Beliau menyatakan bahwa elemen yang paling mendukung proses pembangunan berasal dari tingkat pendidikan individu atau komunitasnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , tujuan pendidikan adalah untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan potensinya sehingga mereka dapat menjadi individu yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik, menjaga kesehatan, memiliki pengetahuan, memiliki kreativitas, memiliki keterampilan, mampu mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

(Danim, 2010) menyatakan bahwa pendidikan memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Pengembangan potensi psikologis, emosional, dan motorik peserta didik.
2. Penggalian nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. Meningkatkan kemampuan adaptasi siswa untuk menghadapi perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berlanjut di masa depan.
4. Memperbaiki serta mengembangkan nilai-nilai moral siswa agar mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang benar dan salah.

Pendidikan yang berkualitas akan mempengaruhi pemahaman dan sudut pandang seseorang, serta keterampilan yang dimilikinya dalam konteks pembangunan.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Pengangguran dan kemiskinan saling berkaitan erat. Kehilangan pekerjaan dapat menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Akibatnya, mereka berisiko lebih tinggi jatuh ke dalam kemiskinan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar pula kemungkinan terjadinya peningkatan angka kemiskinan. Menurut Linconlin Arsyad, terdapat hubungan yang kuat antara status pekerjaan dan tingkat kesejahteraan seseorang. Pengangguran seringkali dikaitkan dengan kemiskinan, sementara pekerjaan tetap, terutama di sektor formal, cenderung memberikan stabilitas finansial.

2.2.2 Hubungan PDRB Terhadap Kemiskinan

Menurut Sadono Sukirno (2004), pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memperhitungkan besar kecilnya kenaikan tersebut. Namun, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan PDRB secara keseluruhan. Distribusi pendapatan yang merata ke seluruh lapisan masyarakat juga menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan. Ketika PDRB suatu daerah menurun, kualitas hidup dan konsumsi rumah tangga cenderung menurun. Masyarakat dengan pendapatan terbatas seringkali mengurangi jumlah dan kualitas makanan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dianggap sebagai cerminan keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan. Pada tahap awal pembangunan, kemiskinan seringkali meningkat sementara pada tahap akhir cenderung menurun. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan kemiskinan di Indonesia antara lain pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil, peningkatan investasi baik dari sektor swasta maupun pemerintah, pengembangan teknologi yang inovatif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pertumbuhan penduduk.

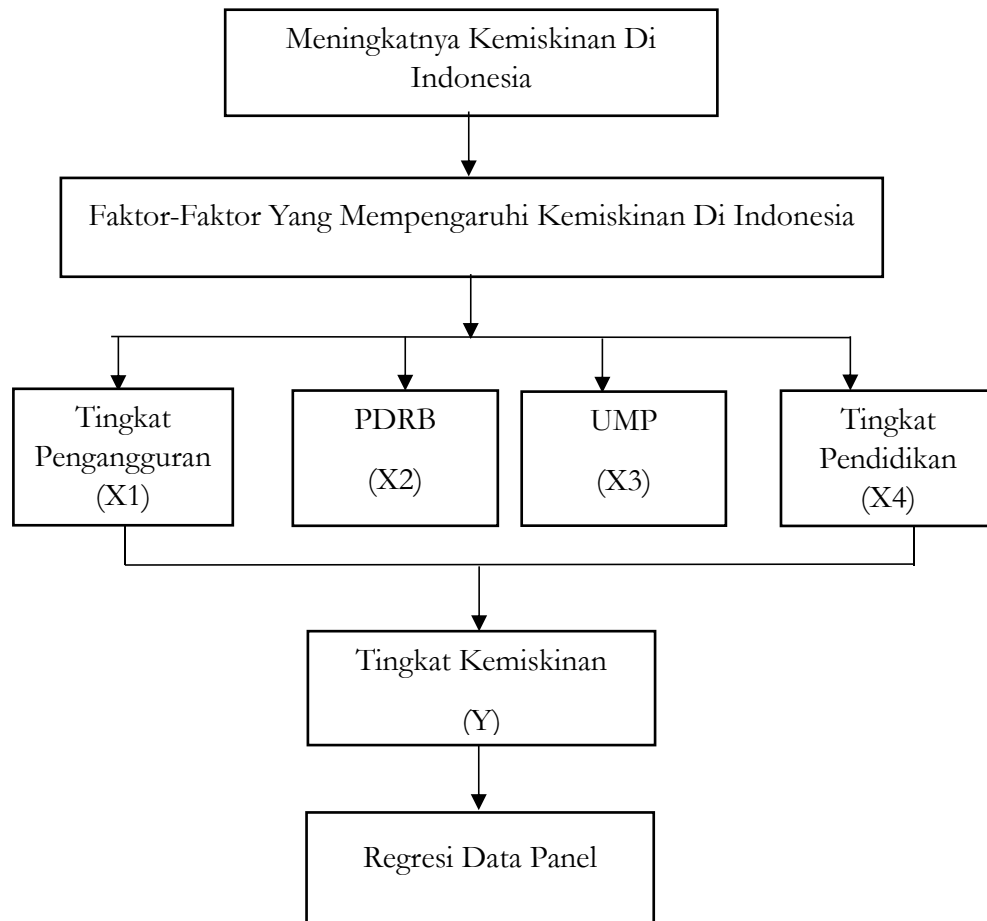
2.2.3 Hubungan UMP Terhadap Kemiskinan

Kaufman (2000) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kebijakan peningkatan upah minimum merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan upah yang layak kepada pekerja, pendapatan masyarakat akan meningkat secara signifikan, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar dan bahkan meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Upah minimum tidak berpengaruh terhadap pekerja informal, di Indonesia mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor informal. Dampak dari kenaikan upah minimum cenderung hanya berpengaruh pada pekerja formal.

2.2.4 Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Menurut Todaro (2006), pendidikan berperan sentral dalam membangun kapasitas suatu negara untuk mengadopsi teknologi mutakhir dan pengembangan potensi guna mewujudkan pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk mencegah kemiskinan, tercermin dari anggapan bahwa individu yang mendambakan pekerjaan berkualitas dan penghasilan tinggi harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Namun, akses terhadap pendidikan tinggi seringkali terbatas bagi masyarakat kurang mampu akibat kendala finansial, sehingga pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan.

2.3 Kerangka Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dugaan berdasarkan uraian paradigma di atas maka rumusan hipotesis yaitu sebagai berikut :

1. Diduga Tingkat Pengangguran berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Indonesia.
2. Diduga PDRB berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Indonesia.
3. Diduga UMP berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Indonesia.
4. Diduga Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Cara Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data tersebut dipublikasikan sebagai hasil pengolahan oleh instansi terkait. Badan-badan tersebut adalah Badan Pusat Statistik Indonesia. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode literatur. Data yang digunakan adalah data *time series* periode 2018-2022. Analisis data mengadopsi model analisis data panel (panel pooled data), yang merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Data panel digunakan dengan dua jenis informasi, yaitu informasi antar unit (*cross section*) yang menunjukkan perbedaan antar subjek, dan informasi sepanjang waktu (*time series*) yang menjelaskan perubahan subjek dari waktu ke waktu.

3.2 Definisi Variabel Operasional

3.2.1 Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemiskinan Di Indonesia, sedangkan variabel independennya antara lain terdiri dari Tingkat Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi, dan Pendidikan . Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Definisi operasional dari masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Kemiskinan (Y)

Orang yang dapat dianggap sebagai penduduk miskin sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin adalah mereka yang entah sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian namun tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi diri

mereka sendiri atau keluarganya. Garis kemiskinan adalah suatu nilai yang mencerminkan jumlah minimum dalam bentuk rupiah yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan pokok, termasuk makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari, serta kebutuhan pokok lainnya selain makanan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa pada bulan September 2022, nilai Garis Kemiskinan (GK) mengalami kenaikan signifikan sebesar 5,95% jika dibandingkan dengan bulan Maret 2022. Sebelumnya, GK per kapita per bulan berada pada angka Rp 505.469, namun kini telah naik menjadi Rp 535.547. Peningkatan ini merupakan yang paling tinggi selama 9 tahun terakhir. Artinya, masyarakat yang pengeluarannya kurang dari Rp 535.547 per bulan dikategorikan sebagai penduduk miskin di Indonesia. Data untuk variabel kemiskinan di Indonesia menggunakan data jumlah tingkat kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia periode 2018-2022 (dalam jiwa).

2. Pengangguran (X1)

(Sadono, 2000), pengangguran dapat dijelaskan sebagai suatu situasi di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja memiliki keinginan untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi mereka belum berhasil menemukannya. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang ingin bekerja tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Di Indonesia penduduk dengan usia 15-65 tahun termasuk sebagai angkatan kerja, maka penduduk di rentang usia tersebut yang tidak bekerja di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2018-2022 digolongkan sebagai pengangguran.

3. Produk Domestik Regional Bruto (X2)

Produk Domestik Regional Bruto merupakan aktivitas ekonomi pada suatu wilayah tertentu berupa barang maupun jasa yang bertambah dengan tiga pendekatan meliputi pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. PDRB dihitung berdasarkan harga di tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar untuk melihat struktur perekonomian pada suatu wilayah. Dalam penelitian ini menggunakan PDRB konstan

4. Upah Minimum Provinsi (X3)

Upah Minimum Provinsi adalah suatu tingkat bayaran minimal yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja, yang ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan ini dilakukan setiap tahun dan didasarkan pada perhitungan yang mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari periode sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memberikan indikasi pendapatan yang cukup bagi individu untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap bulannya. Data Upah Minimum Provinsi merupakan hasil keputusan atas penetapan setiap tahunnya yang bersumber dari Kemenakertrans. Data tersebut merupakan data lengkap atas seluruh provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.

5. Pendidikan (X4)

Pendidikan menurut Carter V.Good adalah proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh lingkungan yang terstruktur dan terkontrol, sehingga seseorang dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu secara optimal. Pendidikan menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap kemiskinan di setiap wilayah, dengan tingkat Pendidikan yang tinggi maka kualitas dari sumber daya manusia lebih berkualitas. Indonesia memiliki sistem pendidikan nasional sendiri dengan kebijakan wajib belajar selama 12 tahun. Ini mencakup sembilan tahun dalam pendidikan dasar, yang terdiri dari enam tahun di sekolah dasar dan masing-masing tiga tahun di SMP dan SMA, namun Indonesia pendidikan masih belum merata ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dalam penelitian ini menggunakan data pendidikan tamat SMA.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dimana data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Data sekunder yang digunakan merupakan data panel yang terdiri dari data deret waktu (*time series*) dalam kurun waktu 2018-2022 dan data deret unit (*cross section*) yang meliputi 34 provinsi di Indonesia.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan yakni metode regresi data panel dengan program Eviews. Regresi data panel adalah gabungan antara data *time series* dan *cross section*, dimana unit *cross section* yang sama akan diukur dalam periode waktu yang berbeda. Dengan asumsi variabel terikat Y dan variabel bebas X, model yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y: Kemiskinan (Jiwa)

X₁: Tingkat Pengangguran (Persen)

X₂: PDRB (Juta Rupiah)

X₃: Upah Minimum (Juta Rupiah)

X₄: Pendidikan (Jiwa)

β_0 : Intersep atau Konstanta

$\beta_{1,2}$: Koefisien Regresi

t: Tahun

e_i: Variabel Pengganggu (*error term*)

3.5 Persamaan Model Penelitian

Analisis pada model regresi data panel terdapat 3 pendekatan, yaitu :

3.5.1 *Common Effect Models (CEM)*

Pendekatan ini adalah pendekatan yang sederhana pada estimasi regresi data panel, yaitu menggabungkan data *time series* dengan *cross section*. Estimasi dalam model *common effect* diasumsikan bahwa intersep dan slope antara individu adalah sama, tidak terdapat perbedaan. Dengan kata lain pendekatan dengan

teknik *common effect* tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu (Widarjono, 2018).

3.5.2 *Fixed Effect Models (FEM)*

Pendekatan efek tetap, atau dikenal juga sebagai *fixed effect*, mengimplikasikan bahwa suatu entitas mempertahankan nilai konstan selama periode waktu yang berbeda-beda. Hal yang serupa terjadi pada koefisien regresi, yang tidak berubah seiring berjalannya waktu (*time invariant*) (Winarno, 2017). Model efek tetap adalah model yang memiliki intersep yang berbeda-beda untuk setiap individu atau subjek (*cross section*), sementara slope untuk setiap subjek tetap tidak berubah sepanjang waktu (Gujarati & Damodar N, 2004). Model ini mengasumsikan bahwa intersep bervariasi antara subjek-subjek, sementara slope-nya tetap konsisten di antara subjek-subjek tersebut.

3.6 Uji Pemilihan Model

3.6.1 Uji Chow (*Chow Test*)

Uji chow dilakukan guna mengetahui model yang paling tepat dalam memberikan informasi regresi data panel antara model *fixed effect* dan *common effect*. Rumusan hipotesis uji chow yaitu :

H0: Model *Common Effect* (CEM)

H1: Model *Fixed Effect* (FEM)

Kriteria untuk menolak H0 dalam uji chow yaitu dengan uji F. Apabila nilai F statistik lebih besar dari F tabel, atau dengan nilai *p-value* (nilai probabilitas F) lebih kecil 5% maka menolak H0 dan model pendekatan yang dipilih yaitu *model fixed effect* dan jika nilai *p-value* lebih besar 5% maka model yang dipilih yaitu model *common effect*.

3.6.2 Uji Hausman

Uji hausman dilakukan guna menentukan model yang mana lebih diantara model. *Fixed effect* dan model *Random effect*. Rumusan hipotesis uji hausman yaitu:

H0: Model *Random Effect* (REM)

H1: Model *Fixed Effect* (FEM)

Kesimpulan Uji hausman yaitu dengan melihat nilai *p-value*. Jika nilai *p-value* lebih kecil dari 5% maka model yang dipilih adalah model *fixed effect*, dan jika nilai *p-value* lebih besar dari 5% maka yang dipilih adalah model *random effect*.

3.7 Uji Statistik

Dalam uji statistic terdiri dari uji determinasi (R^2), koefisien regresi secara parsial (uji t), serta uji regresi secara simultan (uji F).

3.7.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan guna mengukur seberapa baik garis regresi yang ditunjukkan dengan presentase. Koefisien determinasi mengukur presentase total dari variasi dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen di dalam regresi. Nilai koefisien determinasi selalu naik apabila variabel independennya terus ditambah, semakin tingginya nilai koefisien determinasi menunjukkan hubungan yang erat antara variabel dependen dengan variabel independennya.

3.7.2 Koefisien Regresi Secara Parsial (uji t)

Uji t merupakan uji koefisien regresi yang mana menguji pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Uji t dapat menggunakan uji hipotesis berdasarkan nilai probabilitas statistik t (*p-value*) dibanding dengan nilai α . Dengan asumsi pengambilan keputusan yaitu dengan melihat nilai signifikansi nilai $\alpha = 5\%$ terhadap masing-masing variabel independen.

3.7.3 Uji Regresi Secara Simultan (uji F)

Uji kelayakan model ini untuk mengetahui variabel independen secara bersama-sama apakah mempengaruhi variabel dependen. Kesimpulan dari uji F yaitu jika F hitung lebih besar dari F kritis maka menolak H0, sedangkan jika F

hitung lebih kecil dari F kritis maka menerima H_0 . Nilai F kritis didapatkan dari besarnya α dengan df untuk numerator (k-1) dan df untuk denominator (n-k).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel yang menggabungkan data dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2018-2022. Data ini terdiri dari berbagai indikator ekonomi dan sosial, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, dan PDRB. Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.. Variabel yang digunakan yaitu tingkat kemiskinan Indonesia (Y), tingkat pengangguran (X1), PDRB (X2), upah minimum provinsi (X3), tingkat Pendidikan (X4). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah program Eviews 12.

4.2 Hasil Analisis Dan Pembahasan

Metode regresi data panel dilakukan dengan pemilihan metode yang tepat untuk menganalisis hasil penelitian, metode tersebut diantaranya adalah *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Pemilihan model dilakukan melalui uji chow test dan uji hausman test, setelah didapatkan hasilnya maka model dipilih salah satu yang paling tepat untuk digunakan pada tahap uji statistik.

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan bentuk penyajian data yang informatif sehingga mudah dipahami dan dimengerti bagi pembaca data. Dengan menggunakan data statistika dapat mengetahui ukuran lokasi data, salah satunya melalui perhitungan rata-rata. Selain itu dapat mencari persebaran data (*measures of dispersion*), atau variasi data (*measures of variation*) seperti ukuran tingkat persebaran data melalui standar deviasi.

Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif

	TPT	PDRB	UMP	TP	Y
Mean	5.201471	326463.3	2478257.	63.00818	769.8649
Min	1.400000	25050.00	1454154.	27.44000	48.61000
Max	10.95000	1953455.	4641854.	90.12000	4585.970
Std. Deviation	1.797276	462331.9	546095.6	11.01373	1067.252
Obs: 170					

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah observasi setiap variabel berjumlah 170 data. Variabel Kemiskinan (Y) memiliki nilai minimum sebesar 48.61000, dan nilai maksimum sebesar 4585.970, nilai rata-rata sebesar 769.8649, serta nilai standar deviasi sebesar 1067.252 (diatas rata-rata) artinya kemiskinan (Y) memiliki tingkat variasi data yang tinggi. Variabel TPT (Tingkat Pengangguran) memiliki nilai minimum 1.400000 dan nilai maksimum 10.95000, rata-rata TPT adalah sebesar 5.201471 serta nilai standar deviasi sebesar 1.797276. Variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) memiliki nilai minimum 25050.00 dan nilai maksimum 1953455, rata-rata PDRB adalah sebesar 326463.3 serta nilai standar deviasi sebesar 462331.9. Variabel UMP (Upah Minimum Provinsi) memiliki nilai minimum 1454154 dan nilai maksimum 4641854, rata-rata UMP adalah sebesar 2478257 serta nilai standar deviasi sebesar 546095.6. Variabel TP (Tingkat Pendidikan) memiliki nilai minimum 27.44000 dan nilai maksimum 90.12000, rata-rata TP adalah sebesar 63.00818 serta nilai standar deviasi sebesar 11.01373 (dibawah rata-rata) artinya TP memiliki tingkat variasi data yang rendah.

4.2.2 Pengujian *Common Effect Model* (CEM)

Model common effect merupakan yang paling sederhana karena hanya dengan kombinasi data *time series* dan *cross section*.

Tabel 4. 2 Hasil Model Common Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	t-Statistic
C	27.03339	3.259133	8.294659	0.0000
TPT	0.027221	0.031826	0.855293	0.3936
LOG(PDRB)	0.664905	0.046228	14.38318	0.0000
LOG(UMP)	-1.868237	0.213867	-8.735505	0.0000
TP	-0.026435	0.004670	-5.660176	0.0000
R-squared	0.704022	Prob(F-statistic)		0.000000
Adjusted R-squared	0.696847	S.D. dependent var		1.074801
F-statistic	98.11862	Durbin-Watson stat		0.268830

4.2.3 Pengujian *Fixed Effect Model* (FEM)

Model fixed effect mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep untuk setiap individu. Kemudian slope (koefisien regresi) diasumsikan tetap antar individu dan antar waktu. Model fixed effect biasa juga disebut dengan Teknik *Least Square Dummy Variable* (LSDV)

Tabel 4. 3 Hasil Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	t-Statistic
C	5.107014	0.846938	6.029975	0.0000
TPT	0.032141	0.005556	5.785068	0.0000
LOG(PDRB)	-0.101190	0.070371	-1.437946	0.1528
LOG(UMP)	0.125038	0.050737	2.464443	0.0150
TP	0.001970	0.001072	1.837819	0.0683

Tabel 4. 3 Hasil Model Fixed Effect (Lanjutan)

R-squared	0.998564	Prob(F-statistic)	0.000000
Adjusted R-squared	0.998161	S.D. dependent var	1.074801
F-statistic	2480.684	Durbin-Watson stat	1.156877

4.2.4 Pengujian *Random Effect Model* (REM)

Dalam Teknik random effect mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki perbedaan intersep yang diakomodasi oleh error terms. Model *random effect* juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM)

Tabel 4. 4 Hasil Teknik Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	t-Statistic
C	3.285321	0.791561	4.150433	0.0001
TPT	0.040285	0.005398	7.462336	0.0000
LOG(PDRB)	0.189971	0.055049	3.450962	0.0007
LOG(UMP)	0.015620	0.048573	0.321579	0.7482
TP	0.000314	0.001046	0.300445	0.7642
R-squared	0.254838	Prob(F-statistic)	0.000000	
Adjusted R-squared	0.236774	S.D. dependent var	0.062869	
F-statistic	14.10712	Durbin-Watson stat	0.764418	

4.2.5 Uji Chow

Uji chow dilakukan guna mengetahui diantara model *common effect* atau *fixed effect* model mana yang lebih tepat memberikan informasi regresi data panel. Rumusan hipotesis uji chow yaitu:

H0: Model *Common Effect* (CEM)

H1: Model *Fixed Effect* (FEM)

Dari hasil regresi yang dilakukan diperoleh probabilitas sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	820.408089	(33,132)	0.0000
Cross-section Chi-square	905.823121	33	0.0000

Estimasi uji chow dengan redundant test dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas *cross-section F* sebesar 0.0000 lebih kecil dari $\alpha=5\%$ (0.0000<0.05) artinya menolak H0. Sehingga hal tersebut menunjukkan model yang tepat digunakan untuk menguji hipotesis adalah *fixed effect* model.

Kemudian dilakukan pengujian untuk memilih model *fixed effect* atau *random effect* dengan melakukan uji Hausman test.

4.2.6 Uji Hausman

Uji hausman dilakukan guna menentukan antara model *fixed effect* dan model *random effect* mana yang lebih tepat digunakan. Rumusan hipotesis uji hausman yaitu:

H0: Model *Random Effect* (REM)

H1: Model *Fixed Effect* (FEM)

Dari hasil regresi yang dilakukan diperoleh probabilitas sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	73.350662	4	0.0000

Berdasarkan hasil uji hausman test dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas *Chi-square* sebesar 0.0000 lebih kecil dari $\alpha=5\%$ ($0.0000 < 0.05$) artinya menolak H_0 . Sehingga hasil tersebut menunjukkan model yang tepat digunakan adalah *fixed effect* model.

Berdasarkan uji chow dan uji hausman menunjukkan metode yang paling tepat digunakan pada penelitian ini adalah *fixed effect* model.

4.2.7 Model Regresi Terbaik

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diatas maka dapat diketahui bahwa model terbaik yang dapat digunakan guna melakukan analisis yaitu model regresi *fixed effect* models.

Tabel 4. 7 Hasil Regresi Terbaik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	t-Statistic
C	5.107014	0.846938	6.029975	0.0000
TPT	0.032141	0.005556	5.785068	0.0000
LOG(PDRB)	-0.101190	0.070371	-1.437946	0.1528
LOG(UMP)	0.125038	0.050737	2.464443	0.0150
TP	0.001970	0.001072	1.837819	0.0683
R-squared	0.998564	Prob(F-statistic)	0.000000	
Adjusted R-squared	0.998161	S.D. dependent var	1.074801	

Tabel 4. 7 Hasil Regresi Terbaik (lanjutan)

F-statistic	2480.684	Durbin-Watson stat	1.156877
-------------	----------	-----------------------	----------

Hasil estimasi regresi data panel diperoleh guna mengetahui pengaruh tingkat pengangguran, PDRB, UMP, tingkat Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Menurut hasil pengujian yang dilakukan, maka diperoleh hasil estimasi dengan model terbaik yaitu:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y: Kemiskinan (Jiwa)

X₁: Tingkat Pengangguran (Persen)

X₂: PDRB (Juta Rupiah)

X₃: Upah Minimum (Juta Rupiah)

X₄: Pendidikan (Jiwa)

α : Intersep atau Konstanta

$\beta_{1,2}$: Koefisien Regresi

t: Tahun

4.3 Pemilihan Model Yang Tepat**4.3.1 Koefisien Determinasi (R²)**

Hasil estimasi *fixed effect* model menyatakan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.998564, yang mana nilai tersebut menyatakan kemampuan variabel independent Tingkat Pengangguran (X₁), PDRB (X₂), Upah Minimum Provinsi (X₃), Tingkat Pendidikan (X₄) mampu menjelaskan variabel dependen Kemiskinan Indonesia sebesar 99,85%, sedangkan 0,15% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.3.2 Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan guna mengetahui pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai probabilitas $\alpha=5\%$.

4.3.2.1 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Indonesia

Berdasarkan hasil signifikansi tingkat pengangguran memiliki probabilitas sebesar 0.0000 kurang dari $\alpha=5\%$ ($0.0000 < 0.05$) sehingga dapat dinyatakan tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018-2022.

4.3.2.2 Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan Indonesia

Berdasarkan hasil signifikansi PDRB memiliki probabilitas sebesar 0.1528 lebih dari $\alpha=5\%$ ($0.1528 > 0.05$) sehingga dapat dinyatakan PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018-2022. Mengingat nilai PDRB yang sangat besar, dalam penelitian ini digunakan transformasi logaritma untuk menyederhanakan nilai variabel tanpa mengubah proporsi relatif antar data. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih efisien.

4.3.2.3 Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan Indonesia

Berdasarkan hasil signifikansi upah minimum provinsi memiliki probabilitas sebesar 0.0150 kurang dari $\alpha=5\%$ ($0.0150 < 0.05$) sehingga dapat dinyatakan upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018-2022. Mengingat nilai Upah Minimum Provinsi yang sangat besar, dalam penelitian ini digunakan transformasi logaritma untuk menyederhanakan nilai variabel tanpa mengubah proporsi relatif antar data. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih efisien

4.3.2.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Indonesia

Berdasarkan hasil signifikansi tingkat Pendidikan memiliki probabilitas sebesar 0.0683 kurang dari $\alpha=10\%$ ($0.0683 < 0.1$) sehingga dapat dinyatakan tingkat pendidikan berpengaruh positif pada alpha 10%, terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018-2022.

4.3.3 Koefisien Regresi Secara Simultan (uji F)

Uji F dilakukan guna mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (menyeluruh) terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji statistic diperoleh f statistik sebesar 2480.684 dengan propabilitas f statistiknya sebesar 0.000000 kurang dari $\alpha=5\%$ ($0.000000 < 0.05$) sehingga variabel Tingkat Pengangguran, PDRB, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pendidikan secara bersama-sama (menyeluruh) berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

4.3.4 Analisis Ekonomi

4.3.4.1 Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Indonesia

Hasil penelitian menyatakan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2018-2022. Hal ini menunjukkan pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan, karena tingginya jumlah pengangguran akan berdampak terhadap rendahnya pendapatan ekonomi mereka. Kebutuhan yang semakin meningkat akan membuat masyarakat pengangguran tidak dapat menghasilkan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat. Hal ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Meningkatkan lapangan pekerjaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan lapangan kerja yang tinggi Masyarakat pada usia angkatan kerja dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini akan menambah kesejahteraan penduduk dan mengurangi penduduk angkatan kerja yang menganggur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yulia, 2021) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi adalah menciptakan sebanyak mungkin peluang kerja, sehingga tenaga kerja di suatu negara dapat terlibat secara maksimal dalam

aktivitas ekonomi, sambil mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka akan mengakibatkan penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga pendapatan perkapita menurun dan tingkat kesejahteraan menurun sementara tingkat kemiskinan meningkat.

4.3.4.2 Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Indonesia

Hasil penelitian menyatakan PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018-2022, karena probabilitasnya lebih dari 0.05 (5%) sebesar 0.1528. Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, meskipun hubungan ini tidak terlalu signifikan secara statistik. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Kuswantoro & Dewi, 2016) yang menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan disebabkan karena pendistribusian pembangunan dan perekonomian tidak tersebar secara merata di semua wilayah Indonesia. Perkembangan PDRB hanya tersebar di sebagian wilayah yang ada di Indonesia, sehingga perkembangan PDRB tersebut belum mampu berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Peristiwa tersebut menyebabkan kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan tetap meningkat.

4.3.4.3 Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan Indonesia

Hasil penelitian menyatakan UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini berarti peningkatan upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, nilai upah minimum terus meningkat setiap tahunnya dan tingkat kemiskinan ikut meningkat pada tahun 2020-2022. Di Indonesia mayoritas penduduk bekerja secara informal yang berarti, seringkali tidak terikat oleh aturan formal ketenagakerjaan, termasuk upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Pekerja informal berada

dalam sektor ekonomi yang lebih fleksibel dan tidak terstruktur. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah mungkin belum mampu secara efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika dikaitkan dengan dampak sosial dari inflasi, kenaikan upah minimum mungkin terasa tidak berarti jika inflasi terus meningkat. Dapat disimpulkan bahwa ketika inflasi meningkat menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga dalam beberapa sektor akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang mengurangi pendapatan masyarakat menurun dan meningkatkan kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Erliza, Dewi 2021) yang menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

4.3.4.4 Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia karena probabilitasnya kurang dari 0.1 (10%) sebesar 0.0683. Berdasarkan data pada tahun 2018,2020, dan tahun 2021 tingkat pendidikan mengalami kenaikan disertai dengan meningkatnya kemiskinan namun, pada tahun 2019 tingkat pendidikan mengalami penurunan dan penurunan kemiskinan, dan pada tahun 2022 tingkat pendidikan mengalami kenaikan namun tingkat kemiskinan mengalami penurunan ini berarti meningkatnya tingkat pendidikan tidak selalu diikuti dengan meningkatnya kemiskinan. Hal ini berlawanan dengan hipotesis sebelumnya disebabkan disebabkan karena pendidikan yang tidak merata dan hanya di beberapa wilayah, menyebabkan pendidikan di desa atau daerah tertentu masih rendah.

Kurangnya pendidikan menyebabkan rendahnya keterampilan dan daya saing di pasar kerja, khususnya masyarakat pada daerah terpencil yang tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas cenderung sulit untuk keluar dari kemiskinan .Pada daerah terpencil akses pendidikan seringkali masih kekurangan, seperti kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar berkualitas. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan yang diterima masyarakat dan

meningkatkan kesenjangan antar daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu milik (Kausar 2022) yang menyatakan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh PDRB, TPT, UMP, dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia periode 2018-2022. Berdasarkan pada beberapa pengujian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2018-2022. Artinya, setiap kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap meningkatnya kemiskinan di Indonesia
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2018-2022. Karena, kenaikan PDRB tidak selalu mempengaruhi penurunan kemiskinan secara signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan PDRB yang tidak tersebar secara merata pada setiap wilayah di Indonesia yang berdampak pada kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan ikut meningkat.
3. Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2018-2022. Artinya, setiap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh secara signifikan terhadap meningkatnya kemiskinan. Hal ini disebabkan meningkatnya inflasi dan daya beli masyarakat menurun.
4. Tingkat Pendidikan di Indonesia berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2018-2022. Karena, kenaikan angka tingkat pendidikan secara signifikan berpengaruh terhadap kenaikan kemiskinan. Hal tersebut karena akses pendidikan yang tidak merata pada daerah tertentu menyebabkan pada daerah-daerah perkotaan saja yang memiliki tingkat pendidikan tinggi.

5.2 Saran

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipraktikkan berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan:

1. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran menjadi salah satu faktor meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan jumlah lapangan kerja bagi para angkatan kerja, terbatasnya jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan angkatan kerja mengakibatkan banyak angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Program seperti mendorong masyarakat untuk berwirausaha, penyuluhan industri rumah tangga, dan memberikan pelatihan dan sertifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas sdm masyarakat serta mengurangi bertambahnya tingkat pengangguran di Indonesia.
2. Pada penelitian yang dilakukan PDRB tidak berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pembangunan ekonomi secara menyeluruh, di seluruh wilayah Indonesia agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan secara merata. Karena berdasarkan penelitian peningkatan PDRB belum mampu berkontribusi dalam penurunan tingkat kemiskinan.
3. Kenaikan upah minimum tidak efektif menurunkan kemiskinan, karena meningkatnya inflasi dan daya beli masyarakat menurun yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja serta penurunan pendapatan masyarakat. Diharapkan pemerintah dapat memberikan dukungan kepada UMKM serta menjaga stabilitas fiskal dan moneter dengan pengendalian inflasi dan kebijakan suku bunga yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Program-program pemberdayaan ekonomi seperti koperasi dan usaha mikro dapat membantu masyarakat miskin meningkatkan pendapatan mereka.
4. Untuk mengurangi angka kemiskinan, pemerintah sebaiknya fokus pada meningkatkan pendidikan di daerah terpencil, dan memperluas program beasiswa dan bantuan pendidikan agar masyarakat miskin dapat mengakses pendidikan yang layak. Untuk mengurangi tenaga pengajar di daerah

terpencil pemerintah dapat melakukan program pengiriman guru dengan insentif khusus, termasuk pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, S. (2010). *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Djojohadikusumo, S. (1995). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Edi, S. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Gindling, T., & Terrell, K. (2010). Minimum Wage Effect of Minimum Wages on the Employment and Earnings. Departement of Economics. American University Working Paper Series.
- Gujarati, & Damodar N. (2004). *Basic Econometrics* (4th ed.). McGraw-Hill Inc.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- Lincoln, A., & Adiningsih, S. (1997). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- Mankiw, N. G. (2002). *Macroeconomics*, Worth Publishers: New York, NY.
- Munkner, H. H., & Walter, T. (2001). *Sektor Informal Sumber Pendapatan Bagi Kaum Miskin, dalam Menggempur Akar-Akar Kemiskinan (Izzedin Bakhit dkk). Attacking the Roots of Poverty*, Jakarta: Yakoma-PDI.
- Paramita, A. A. I. D., & Purbadharmaja, I. B. P. (2015). Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(10), 44574.
- Sadono, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saputra, W. A. (2011). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soesastro, H. (2005). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir* (1st ed., Vol. 5). Jakarta: Kanisius.
- Subroto, G. (2014). Hubungan Pendidikan dan Ekonomi: Perspektif Teori dan Empiris. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 20(3), 390–405.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Leonita, L., & Kurnia Sari, R. (2019). *Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia* (Vol. 3, Issue 2).
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan aplikasi Disertai Panduan Eviews* (kelima). UPP STIM YKPN.

- Winarno, W. W. (2017). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. UPP STIM YKPN.
- Kuswanto, & Dewi, I. G. P. (2016). Analisis Tingkat Pendidikan, PDRB, dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 18–35.
- Wulansari, R. Y., Fadhilah, N., Huda, M., Abidin, A. Z., & Sujianto, A. E. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 6(1), 82–95.
- Adella, Y., Program, S., Pembangunan, S. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). *Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah*. (Vol. 10, Issue 2).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Panel Least Squares

Date: 11/27/23 Time: 21:00

Sample: 2018 2022

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.107014	0.846938	6.029975	0.0000
TPT	0.032141	0.005556	5.785068	0.0000
LOG(PDRB)	-0.101190	0.070371	-1.437946	0.1528
LOG(UMP)	0.125038	0.050737	2.464443	0.0150
TP	0.001970	0.001072	1.837819	0.0683

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.040610	R-squared	0.998564
Mean dependent var	6.022620	Adjusted R-squared	0.998161
S.D. dependent var	1.074801	S.E. of regression	0.046086
Akaike info criterion	-3.122536	Sum squared resid	0.280362
Schwarz criterion	-2.421592	Log likelihood	303.4155
Hannan-Quinn criter.	-2.838101	F-statistic	2480.684
Durbin-Watson stat	1.156877	Prob(F-statistic)	0.000000

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	73.350662	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
TPT	0.032141	0.040285	0.000002	0.0000
LOG(PDRB)	-0.101190	0.189971	0.001922	0.0000
LOG(UMP)	0.125038	0.015620	0.000215	0.0000
TP	0.001970	0.000314	0.000000	0.0000

Lampiran 2. Hasil Uji Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Panel Least Squares

Date: 11/27/23 Time: 23:50

Sample: 2018 2022

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.03339	3.259133	8.294659	0.0000
TPT	0.027221	0.031826	0.855293	0.3936
LOG(PDRB)	0.664905	0.046228	14.38318	0.0000
LOG(UMP)	-1.868237	0.213867	-8.735505	0.0000
TP	-0.026435	0.004670	-5.660176	0.0000
Root MSE	0.583011	R-squared		0.704022
Mean dependent var	6.022620	Adjusted R-squared		0.696847
S.D. dependent var	1.074801	S.E. of regression		0.591778
Akaike info criterion	1.817600	Sum squared resid		57.78321
Schwarz criterion	1.909830	Log likelihood		-149.4960
Hannan-Quinn criter.	1.855026	F-statistic		98.11862
Durbin-Watson stat	0.268830	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 3. Hasil Uji Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 11/27/23 Time: 23:50

Sample: 2018 2022

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.285321	0.791561	4.150433	0.0001
TPT	0.040285	0.005398	7.462336	0.0000
LOG(PDRB)	0.189971	0.055049	3.450962	0.0007
LOG(UMP)	0.015620	0.048573	0.321579	0.7482
TP	0.000314	0.001046	0.300445	0.7642
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.590326	0.9939
Idiosyncratic random			0.046086	0.0061
Weighted Statistics				
Root MSE	0.054110	R-squared		0.254838
Mean dependent var	0.210144	Adjusted R-squared		0.236774
S.D. dependent var	0.062869	S.E. of regression		0.054924
Sum squared resid	0.497750	F-statistic		14.10712
Durbin-Watson stat	0.764418	Prob(F-statistic)		0.000000
Unweighted Statistics				
R-squared	0.239199	Mean dependent var		6.022620
Sum squared resid	148.5299	Durbin-Watson stat		0.002562

Lampiran 4. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	820.408089	(33,132)	0.0000
Cross-section Chi-square	905.823121	33	0.0000

Lampiran 5. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	73.350662	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
TPT	0.032141	0.040285	0.000002	0.0000
LOG(PDRB)	-0.101190	0.189971	0.001922	0.0000
LOG(UMP)	0.125038	0.015620	0.000215	0.0000
TP	0.001970	0.000314	0.000000	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Panel Least Squares

Date: 11/27/23 Time: 23:52

Sample: 2018 2022

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.107014	0.846938	6.029975	0.0000
TPT	0.032141	0.005556	5.785068	0.0000
LOG(PDRB)	-0.101190	0.070371	-1.437946	0.1528
LOG(UMP)	0.125038	0.050737	2.464443	0.0150
TP	0.001970	0.001072	1.837819	0.0683

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.040610	R-squared	0.998564
Mean dependent var	6.022620	Adjusted R-squared	0.998161
S.D. dependent var	1.074801	S.E. of regression	0.046086
Akaike info criterion	-3.122536	Sum squared resid	0.280362
Schwarz criterion	-2.421592	Log likelihood	303.4155
Hannan-Quinn criter.	-2.838101	F-statistic	2480.684
Durbin-Watson stat	1.156877	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Date: 12/13/23

Time: 18:06

Sample: 2018 2022

	TPT	PDRB	UMP	TP	Y
Mean	5.201471	326463.3	2478257.	63.00818	769.8649
Median	4.755000	137399.5	2464154.	63.82500	355.2550
Maximum	10.95000	1953455.	4641854.	90.12000	4585.970
Minimum	1.400000	25050.00	1454154.	27.44000	48.61000
Std. Dev.	1.797276	462331.9	546095.6	11.01373	1067.252
Skewness	0.856609	2.221385	0.561251	-0.337587	2.458412
Kurtosis	3.767267	6.859097	4.142013	4.179511	7.958633
Jarque-Bera	24.96036	245.3017	18.16313	13.08367	345.4060
Probability	0.000004	0.000000	0.000114	0.001442	0.000000
Sum	884.2500	55498763	4.21E+08	10711.39	130877.0
Sum Sq. Dev.	545.9041	3.61E+13	5.04E+13	20500.09	1.92E+08
Observations	170	170	170	170	170

Lampiran 7. Data Penelitian

Provinsi	Tahun	Kemiskinan	TPT	PDRB	UMP	TP
Aceh	2018	831.5	6.34	126824	2700000	70.68
Aceh	2019	809.76	6.17	132087	2916810	69.96
Aceh	2020	833.91	6.59	131585	3165031	70.07
Aceh	2021	850.26	6.3	135251	2700000	74.36
Aceh	2022	818.47	6.17	140947	3166460	70.67
Sumatera Utara	2018	1291.99	5.55	512766	2132189	68.34
Sumatera Utara	2019	1260.50	5.39	539527	2303403	65.21
Sumatera Utara	2020	1356.72	6.91	533746	2499423	70.39
Sumatera Utara	2021	1273.07	6.33	547651	2132189	72.81
Sumatera Utara	2022	1262.09	6.16	573528	2522609	77.16
Sumatera Barat	2018	353.24	5.66	164034	2119067	65.34
Sumatera Barat	2019	343.09	5.38	172321	2289220	60.32
Sumatera Barat	2020	364.79	6.88	169458	2484041	67.11

Sumatera Barat	2021	339.93	6.52	175000	2119067	70.06
Sumatera Barat	2022	343.82	6.28	182629	2512539	65.96
Riau	2018	494.26	5.98	482158	2464154	63.71
Riau	2019	483.92	5.76	495846	2662026	58.78
Riau	2020	491.22	6.32	490024	2888564	66.62
Riau	2021	496.66	4.42	506471	2464154	68.94
Riau	2022	493.13	4.37	529532	2938564	66.91
Jambi	2018	281.47	3.73	142968	2243719	66.06
Jambi	2019	273.37	4.06	149265	2423889	56.87
Jambi	2020	288.10	5.13	148450	2630162	63.66
Jambi	2021	279.86	5.09	153825	2243719	64.51
Jambi	2022	283.82	4.59	161717	2698940	65.85
Sumatera Selatan	2018	1076.4	4.27	298570	2595995	63.94
Sumatera Selatan	2019	1067.16	4.53	315623	2804453	58.23
Sumatera Selatan	2020	1119.65	5.51	315143	3043111	65.42
Sumatera Selatan	2021	1116.61	4.98	326411	2595995	67.20
Sumatera Selatan	2022	1054.99	4.63	343483	3144446	67.07
Bengkulu	2018	303.55	3.35	44171	1888741	58.86
Bengkulu	2019	298.00	3.26	46362	2040407	61.47
Bengkulu	2020	306.00	4.07	46338	2213604	62.73
Bengkulu	2021	291.79	3.65	47853	1888741	62.46
Bengkulu	2022	292.93	3.59	49916	2238094	64.88
Lampung	2018	1091.6	4.04	232208	2074673	54.89
Lampung	2019	1041.48	4.03	244437	2241270	54.87

Lampung	2020	1091.14	4.67	240307	2432002	57.59
Lampung	2021	1007.02	4.69	246966	2074673	60.09
Lampung	2022	995.59	4.52	257534	2440486	62.42
Kep. Bangka Belitung	2018	69.93	3.61	52215	2755444	55.01
Kep. Bangka Belitung	2019	67.37	3.58	53951	2976706	53.84
Kep. Bangka Belitung	2020	72.05	5.25	52702	3230024	56.74
Kep. Bangka Belitung	2021	69.70	5.03	55369	2755444	63.98
Kep. Bangka Belitung	2022	69.69	4.77	57803	3264884	66.87
Kep. Riau	2018	125.36	8.04	173684	2563875	82.86
Kep. Riau	2019	127.76	7.5	182184	2769754	78.14
Kep. Riau	2020	142.61	10.34	174977	3005460	78.65
Kep. Riau	2021	137.75	9.91	180952	2563875	81.07
Kep. Riau	2022	148.89	8.23	190163	3050172	73.93
DKI Jakarta	2018	372.26	6.65	1736291	3648036	83.48
DKI Jakarta	2019	362.30	6.54	1838501	3940973	84.35
DKI Jakarta	2020	496.84	10.95	1792795	4276350	85.67
DKI Jakarta	2021	498.29	8.5	1856075	3648036	84.98

DKI Jakarta	2022	494.93	7.18	1953455	4641854	87.71
Jawa Barat	2018	3539.4	8.23	1419689	1544361	61.04
Jawa Barat	2019	3375.89	8.04	1491706	1668373	57.46
Jawa Barat	2020	4188.52	10.46	1455235	1810351	63.56
Jawa Barat	2021	4004.86	9.82	1507746	1544361	64.89
Jawa Barat	2022	4053.62	8.31	1589984	1841487	67.05
Jawa Tengah	2018	3867.42	4.47	941164	1486065	55.62
Jawa Tengah	2019	3679.40	4.44	992106	1605396	49.79
Jawa Tengah	2020	4119.93	6.48	965629	1742015	55.82
Jawa Tengah	2021	3934.01	5.95	997345	1486065	59.90
Jawa Tengah	2022	3858.23	5.57	1050322	1812935	58.75
DI Yogyakarta	2018	450.25	3.37	98024	1454154	81.96
DI Yogyakarta	2019	440.89	3.18	104490	1570923	84.54
DI Yogyakarta	2020	503.14	4.57	101680	1704608	87.99
DI Yogyakarta	2021	474.49	4.56	107372	1454154	90.12
DI Yogyakarta	2022	463.63	4.06	112898	1840915	87.92
Jawa Timur	2018	4292.15	3.91	1563769	1508895	62.48

Jawa Timur	2019	4056.00	3.82	1650143	1630059	57.74
Jawa Timur	2020	4585.97	5.84	1610420	1768777	63.53
Jawa Timur	2021	4259.60	5.74	1668749	1508895	66.33
Jawa Timur	2022	4236.51	5.49	1757821	1891567	66.87
Banten	2018	668.74	8.47	434015	2099385	67.54
Banten	2019	641.42	8.11	458023	2267990	56.94
Banten	2020	857.64	10.64	441296	2460997	64.24
Banten	2021	852.28	8.98	460963	2099385	66.90
Banten	2022	829.66	8.09	484141	2501203	66.02
Bali	2018	168.34	1.4	154110	2127157	78.67
Bali	2019	156.91	1.57	162784	2297969	64.52
Bali	2020	196.92	5.63	147550	2494000	74.88
Bali	2021	211.46	5.37	143864	2127157	75.86
Bali	2022	205.36	4.8	150821	2516971	76.59
NTB	2018	735.62	3.58	90391	1825000	52.6
NTB	2019	705.68	3.28	94015	2012610	57.6
NTB	2020	746.04	4.22	93269	2183883	64.66
NTB	2021	735.30	3.01	95437	1825000	65.71
NTB	2022	744.69	2.89	102074	2207212	61.00
NTT	2018	1134.11	2.85	65945	1660000	43.41
NTT	2019	1129.46	3.14	69372	1795000	43.85
NTT	2020	1173.53	4.28	68807	1950000	50.65
NTT	2021	1146.28	3.77	70540	1660000	44.88
NTT	2022	1149.17	3.54	72695	1975000	38.47
Kalimantan Barat	2018	369.73	4.18	130589	2046900	47.66
Kalimantan Barat	2019	370.47	4.35	137121	2211500	49.29
Kalimantan Barat	2020	370.71	5.81	134743	2399699	55.23
Kalimantan Barat	2021	354.00	5.82	141212	2046900	54.27
Kalimantan Barat	2022	356.51	5.11	148368	2434328	58.40

Kalimantan Tengah	2018	136.45	3.91	94601	2421305	53.47
Kalimantan Tengah	2019	131.24	4.04	100429	2663435	50.01
Kalimantan Tengah	2020	141.78	4.58	98957	2903145	60.77
Kalimantan Tengah	2021	141.03	4.53	102481	2421305	61.04
Kalimantan Tengah	2022	144.52	4.26	109094	2922516	61.88
Kalimantan Selatan	2018	195.01	4.35	128093	2454671	61.09
Kalimantan Selatan	2019	190.29	4.18	133318	2651782	59.52
Kalimantan Selatan	2020	206.92	4.74	130866	2877449	63.05
Kalimantan Selatan	2021	197.76	4.95	135422	2454671	63.59
Kalimantan Selatan	2022	201.95	4.74	142339	2906473	67.81
Kalimantan Timur	2018	222.39	6.41	464823	2543332	68.73
Kalimantan Timur	2019	220.91	5.94	486977	2747561	64.74
Kalimantan Timur	2020	243.99	6.87	472865	2981379	71.63

Kalimantan Timur	2021	233.13	6.83	484438	2543332	74.26
Kalimantan Timur	2022	242.3	5.71	506158	3014497	74.00
Kalimantan Utara	2018	49.59	5.11	57837	2559903	58.22
Kalimantan Utara	2019	48.61	4.49	61835	2765463	61.1
Kalimantan Utara	2020	52.70	4.97	60743	3000804	67.77
Kalimantan Utara	2021	49.49	4.58	63162	2559903	62.30
Kalimantan Utara	2022	50.58	4.33	66534	3016738	54.80
Sulawesi Utara	2018	189.05	6.61	84259	2824286	70.02
Sulawesi Utara	2019	188.60	6.01	89028	3051076	67.58
Sulawesi Utara	2020	195.85	7.37	88126	3310723	73.79
Sulawesi Utara	2021	186.55	7.06	91790	2824286	68.56
Sulawesi Utara	2022	187.33	6.61	96767	3310723	66.66
Sulawesi Tengah	2018	413.49	3.37	103593	1965232	53.84
Sulawesi Tengah	2019	404.03	3.11	111003	2123040	52
Sulawesi Tengah	2020	403.74	3.77	134153	2303711	57.68
Sulawesi Tengah	2021	381.21	3.75	149848	1965232	61.16

Sulawesi Tengah	2022	389.71	3	172578	2390739	53.73
Sulawesi Selatan	2018	779.64	4.94	309202	2647767	56.86
Sulawesi Selatan	2019	759.58	4.62	330605	2860382	60.97
Sulawesi Selatan	2020	800.24	6.31	328193	3103800	66.22
Sulawesi Selatan	2021	765.46	5.72	343395	2647767	69.43
Sulawesi Selatan	2022	782.32	4.51	360874	3165876	68.32
Sulawesi Tenggara	2018	301.85	3.19	88329	2177052	67.67
Sulawesi Tenggara	2019	299.97	3.52	94078	2351870	64.26
Sulawesi Tenggara	2020	317.32	4.58	93447	2552015	68.28
Sulawesi Tenggara	2021	323.26	3.92	97276	2177052	70.65
Sulawesi Tenggara	2022	314.74	3.36	102657	2576016	65.97
Gorontalo	2018	188.3	3.7	26721	2206813	52.39
Gorontalo	2019	184.71	3.76	28433	2384020	50.87
Gorontalo	2020	185.31	4.28	28422	2788826	55.35
Gorontalo	2021	184.60	3.01	29110	2206813	53.73
Gorontalo	2022	187.35	2.58	30286	2800580	45.12
Sulawesi Barat	2018	152.83	3.01	31111	2193530	37.65
Sulawesi Barat	2019	151.87	2.98	32874	2381000	48.2
Sulawesi Barat	2020	159.05	3.32	32082	2678863	56.60

Sulawesi Barat	2021	165.99	3.13	32898	2193530	56.22
Sulawesi Barat	2022	169.26	2.34	33654	2678863	55.18
Maluku	2018	317.84	6.95	29467	2222220	66.42
Maluku	2019	319.51	6.69	31109	2400664	67.82
Maluku	2020	322.40	7.57	30765	2604961	70.55
Maluku	2021	294.97	6.93	31702	2222220	68.12
Maluku	2022	296.66	6.88	33321	2619312	72.08
Maluku Utara	2018	81.93	4.63	25050	2320803	60.07
Maluku Utara	2019	87.18	4.81	26586	2508091	59.13
Maluku Utara	2020	87.52	5.15	27868	2721530	66.52
Maluku Utara	2021	81.18	4.71	32739	2320803	66.95
Maluku Utara	2022	82.13	3.98	40248	2862231	67.10
Papua Barat	2018	213.67	6.45	60464	2667000	60.47
Papua Barat	2019	207.59	6.43	62071	2934500	50.95
Papua Barat	2020	215.22	6.8	61592	3134600	61.49
Papua Barat	2021	221.29	5.84	61289	2667000	59.08
Papua Barat	2022	222.36	5.37	62518	3200000	57.07
Papua	2018	915.22	3	159790	3000000	29.56
Papua	2019	900.95	3.51	134678	3240900	27.44
Papua	2020	912.23	4.28	137678	3516700	30.92
Papua	2021	944.49	3.33	158674	3000000	32.95
Papua	2022	936.32	2.83	172904	3561932	39.01